



EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)

Sri Roekminiati

Program Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: arumfia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pemekaran Kecamatan Tegalsari yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang adalah paradigma pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran kecamatan terhadap perkembangan IPM di Kecamatan Tegalsari dan mengetahui hambatan dan tantangan apa yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, observasi lokasi penelitian, dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan dengan adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya. Hambatan yang dialami untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, budaya masyarakatnya masih tradisional, dan kurang adanya pelopor pembangunan, sedangkan tantangan kedepannya adalah adanya kurcun dana yang cukup untuk Kecamatan Tegalsari dan adanya rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi di wilayah lain.

Kata Kunci: Evaluasi, pemekaran, IPM

EVALUATION OF DISTRICT EXPANSION OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX

Abstract

The background of this research is the expansion districts in Banyuwangi, namely splitting the District Tegalsari which aims to improve the execution of tasks and services to accelerate the development of society. Now emerging development paradigm is the paradigm of human development as measured by the human development index (HDI). This study aims to determine the impact of the expansion on the development of IPM sub-districts in the district Tegalsari and know what obstacles and challenges facing the District Tegalsari to improve the HDI. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are the documentation, study site observations, and interviews. Then the data were analyzed with qualitative data analysis. The results show the positive development of the District IPM Tegalsari after splitting evidenced by an increase in the District Tegalsari HDI figures annually. Experienced barriers to improving the District IPM Tegalsari partly because of the potential for a less heterogeneous areas, people still have traditional culture, and the lack of development pioneer, while the challenge is that there is enough funding for the District of Tegalsari and the planned expansion of other districts of Banyuwangi.

Keywords: evaluation, expansion, IPM (HDI).

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang saat ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan perubahan paradigma pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip



demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru mulai banyak dilakukan pasca 1999 atau mulai era reformasi. Selama periode Orde Baru tahun 1966 - 1998 tidak terdapat penambahan daerah otonom baru yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 telah terjadi 217 pembentukan daerah otonom baru dengan rincian 8 provinsi baru, 175 kabupaten baru, dan 34 kota baru.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar dapat lebih maju dari sebelumnya.

Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi untuk pemekaran provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah juga terjadi di wilayah kecamatan. Pemekaran kecamatan dianggap

penting agar pengelolaan daerah semakin mudah. Bupati dan Walikota banyak yang tertarik untuk melakukan pemekaran kecamatan dalam rangka mempercepat pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif menggariskan bahwa kecamatan dan kelurahan adalah merupakan bagian dari perangkat pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 2003-2012 telah terjadi 22 pembentukan kecamatan baru. Data kecamatan baru di Jawa Timur selama 2003-2012 ada pada Tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, di Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 kecamatan baru. Salah satu kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalsari. Kecamatan Tegalsari merupakan kecamatan baru yang 9 tahun ini telah memisahkan diri dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Gambiran. Sejak keluarnya Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Banyuwangi nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, maka sejak itu terbentuklah Kecamatan Tegalsari yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Gambiran, dengan wilayah meliputi beberapa desa antara lain:

1. Desa Tegalsari,
2. Desa Tegalrejo,
3. Desa Karangdoro,
4. Desa Tamansari,
5. Desa Dasri, dan
6. Desa Karangmulyo.

Sebelumnya desa-desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Gambiran.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 32 tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Tegalsari, pemekaran dilakukan karena dilatarbelakangi semakin berkembangnya keadaan dan tingkat kemajuan baik peningkatan jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi khususnya di Kecamatan Gambiran maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat.

Salah satu tujuan pemekaran Kecamatan Tegalsari adalah mempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang



Tabel 1. Kecamatan Baru di Jawa Timur Selama 2003-2012

Nama Kecamatan Baru	Kabupaten	Tahun Pembentukan
Kayen Kidul	Kediri	2004
Ngasem	Kediri	2004
Badas	Kediri	2004
Siliragung	Banyuwangi	2004
Tegalsari	Banyuwangi	2004
Licin	Banyuwangi	2004
Nguntoronadi	Magetan	2003
Sidorejo	Magetan	2007
Gerih	Ngawi	2004
Kasreman	Ngawi	2004
Grabagan	Tuban	2003
Pangarengan	Sampang	2003
Karangpenang	Sampang	2003
Batuan	Sumenep	2004
Kangayan	Sumenep	2004
Taman Krocok	Bondowoso	2005
Botolinggo	Bondowoso	2005
Jambesari Darus Sholah	Bondowoso	2005
Kanigaran	Kota Probolinggo	2006
Kedopak	Kota Probolinggo	2006
Gayam	Bojonegoro	2011
Panggungrejo	Kota Pasuruan	2012

Sumber: www.kemendagri.go.id

sekarang ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Pelaksanaan pembangunan seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan. Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian maka pembangunan manusia menjadi tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu sebagai subyek pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap negara dalam hal ini pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli) maupun aspek moralitas (keimanan dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan sendirinya meningkat (BPS, IPM 2010-2011).

Berdasarkan harapan dan tujuan dari pemekaran Kecamatan Tegalsari tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi apakah dengan adanya pemekaran tersebut

mempunyai dampak perubahan yang positif bagi perkembangan pembangunan manusia pada masyarakat Tegalsari itu sendiri. Dalam mengevaluasi dampak peneliti menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan dari Rossi yang menyatakan bahwa evaluasi dampak adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah kebijakan dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya. Dan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di kecamatan Tegalsari peneliti menggunakan teori indeks pembangunan manusia (IPM) yang dikenalkan oleh United National Development Program (UNDP) yang merupakan rata-rata dari tiga indeks yaitu indeks kesehatan yang diambil dari angka harapan hidup, indeks pendidikan yang diambil dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan indeks daya beli yang diambil dari pengeluaran riil perkapita pertahun yang telah disesuaikan.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pemekaran kecamatan



menyebabkan perkembangan positif pada IPM di Kecamatan Tegalsari?

2. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan IPM di Kecamatan Tegalsari.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dampak pemekaran kecamatan terhadap perkembangan IPM di Kecamatan Tegalsari. Dengan membandingkan sebelum dan sesudah pemekaran.
2. Mengetahui hambatan dan tantangan apa yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM.

B. LANDASAN TEORI

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan (Joko Widodo, 2006:111). Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas (Joko Widodo, 2006: 112).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi kebijakan, (3) konsekuensi kebijakan, (4) efektivitas dampak kebijakan (Samodra Wibawa, 1994: 9). Sementara itu Pall (1987: 52) membagi evaluasi kebijakan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) *Planning and need evaluations*, 2) *Process evaluations*, 3) *Impact*

evaluations, 4) *Efficiency evaluations*.

Menurut William N Dunn dalam Samodra Wibawa (1994: 12), berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Evaluasi sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
3. Evaluasi setelah kebijakan, evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi *impact*/pengaruh (*outcome*) kebijakan.

Tipe Evaluasi kebijakan menurut Peter H. Rossi dalam Joko Widodo (2006: 119) antara lain:

1. *Research for planning and development* (riset untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan)
2. *Project monitoring evaluation research* (riset evaluasi monitoring kebijakan)
3. *Impact evaluation* (evaluasi dampak)
4. *Economic efficiency evaluation* (evaluasi efisiensi ekonomi)
5. *Comprehensive evaluation* (evaluasi komprehensif)

Sedangkan jenis evaluasi berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya, Finsterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994: 74) membagi menjadi empat seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Subarsono, 2005:120):

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui kebijakan maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu

Tabel 2. Empat Jenis Evaluasi Menurut Finsterbusch dan Motz

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single program after-only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan keadaan kelompok sasaran
<i>Comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
<i>Comparatif before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber: Samodra Wibawa, dkk. 1994, hal 74



kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sedangkan outcome adalah hasil dari suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi Dampak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981: 367). Sedangkan evaluasi dampak menurut Rossi,

adalah sebuah evaluasi yang mengukur taraf atau tingkat ketercapaian sebuah kebijakan dalam menyebabkan perubahan seseorang dalam kehidupan yang selanjutnya.

Menurut Rossi dalam Joko Widodo (2006:120) riset evaluasi dampak kebijakan lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki. Riset ini bertujuan untuk menguji efektifitas suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Riset evaluasi dampak kebijakan menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apakah kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengan yang diinginkan?
2. Apakah perubahan tadi merupakan perubahan yang signifikan?

Suatu kebijakan dikatakan mempunyai dampak manakala kebijakan tadi dapat mencapai perubahan ke arah tujuan dan sasaran yang dikehendaki (Joko Widodo, 2006: 121).

Desentralisasi

Dalam istilah ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa desentralisasi bermakna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup semua kewenangan dibidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan pemerintah melalui peraturan pemerintah.

Desentralisasi dalam arti sempit (*devolution*)

Tabel 3. Type of Evaluation Activities and Corresponding Evaluation Issues Menurut Rossi

Type of Evaluation	Purpose	Evaluation Question
Research for program planning and development	Designing program in conformity with intended goals	1. Extend and distribution of target problem population 2. Research and development for program planning and implementation
Monitoring evaluation	Testing implementation as corresponding to program design	1. Is it reaching targets? 2. Is it delivering services according to design?
Impact evaluation	Testing program effectiveness in reaching program goals	1. does program cause intended changes? 2. Are changes substantively significant?
Cost benefit cost-effectiveness	Calculating program economic efficiency	1. How much does each service unit cost? 2. How do the total cost and benefit compare?

Sumber: Joko Widodo, 2006 hal. 123



akan berkaitan dengan dua hal (Smith, 1985:18). Pertama, adanya subdivisi teritori dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Subdivisi teritori ini memiliki self governing melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yurisdiksinya. Wilayah ini tidak diadministrasikan oleh agen-agen pemerintah di atasnya tetapi diatur oleh lembaga yang dibentuk secara politik di wilayah tersebut. Kedua, lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokratis. Berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur demokratis.

Smith (1985:8-12) juga mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen, yakni: pertama, desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratik.

Rondinelli dan Cheema (1983:18-25) mengidentifikasi ada empat jenis desentralisasi, sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi (*deconsentration*), yaitu penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah;
2. Delegasi (*delegation to semi-autonomous or parastatal organizations*), yaitu transfer tanggung jawab untuk fungsi-fungsi secara rinci yang digambarkan pada organisasi-organisasi di luar struktur birokratis yang reguler dan hanya secara tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat;
3. Devolusi (*devolution*), yaitu pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat; dan
4. Privatisasi (*transfer of functions from government to non-government institutions*), yaitu memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah (NGO) atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah.

Tujuan desentralisasi secara umum oleh Smith dibedakan atas dua tujuan utama, yakni tujuan politik dan ekonomis. Secara politis, tujuan desentralisasi antara lain untuk

memperkuat pemerintah daerah, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integritas nasional. Sedangkan secara ekonomi, tujuan desentralisasi, antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public goods and service, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.

Menurut Tadjoeuddin (2001) bahwa desentralisasi adalah dua keping mata uang yang bisa berdampak baik atau buruk bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa disegala bidang, yang oleh karenanya harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dijelaskan oleh Osborne dan Gaebler (1995), bahwa ada beberapa keuntungan yang diraih dengan diterapkannya sistem desentralisasi, yaitu :

1. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan.
2. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Para pegawai yang berada di lini depan, paling dekat dengan masalah dan peluang serta mereka yang lebih tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga akan lebih cepat mengambil keputusan yang diperlukan.
3. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dibanding dengan lembaga yang tersentralisasi. Inovasi biasanya tidak terjadi pada seseorang yang berada pada pucuk pimpinan, tetapi sering muncul dari gagasan baik dari pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dan berhubungan dengan pelanggan.
4. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, sehingga banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya. Pemberian pekerjaan kepada pegawai untuk mengambil keputusan yang penting dalam tugasnya dapat menjadi motivasi bagi mereka, sehingga akan berpengaruh terhadap produktifitas kerjanya.

Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* = sendiri dan *nomos* = Undang-undang, yang berarti perundangan sendiri (*Izelf Wetgeving*). Ada beberapa ahli yang memberi



pengertian tentang otonomi, diantaranya yaitu Manan dalam Agusniar (2006) yang mendefinisikan otonomi sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta tanggung jawab badan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi desentralisasi. Defenisi lebih sederhana disampaikan oleh Mahwood dalam Agusniar (2006) yaitu kebebasan dari pemerintah daerah dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004).

Pemberian otonomi kepada daerah menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirianlah diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal penting lain adalah dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayan publik (*public service*) dapat lebih terjamin.

Menurut Bratakusumah dan Riyadi (2003) ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, yaitu (1) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (2) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan (3) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif serta dalam mengembangkan sumberdaya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan

mereka.

Pemekaran Wilayah

Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah dengan wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah

Tri Ratnawati (2009: 47) berpendapat bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri, pemekaran saat ini tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tertera dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lain-lain.

Pemekaran wilayah/daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Secara normatif, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan



berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional (Undang-Undang Penataan Ruang No.26, 2007: 4). Dalam menganalisis wilayah dikenal 3 tipe, yakni komponen didalam dan diluar wilayahnya. Wujud wilayah sering disebut wilayah nodal yang didasari oleh susunan dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan. Wilayah homogen, artinya adanya relatif kemiripan dalam suatu wilayah. Wilayah administratif, artinya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah beserta perencanaan lokal dan nasionalnya. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang

ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Dalam wacana publik dan kajian akademis diuraikan dorongan pemekaran selama ini lebih banyak muncul dari tuntutan daerah. Beberapa alasan utama daerah mengajukan pemekaran antara lain adalah:

1. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah.
2. Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses delivery pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif.
3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk.
4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah.
5. Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumber Daya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan PP No 129 Tahun 2000 pada Bab II pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban



6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

Dengan demikian pemekaran wilayah merupakan pemisahan suatu wilayah dari wilayah induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada didalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran Kecamatan

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di provinsi dan kabupaten/kota, pemekaran wilayah juga terjadi di wilayah kecamatan. Kecamatan menurut (Widjaja, 2005:12) merupakan: "salah satu organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah" Definisi pemekaran kecamatan menurut (Wasistiono,1992:14) bahwa pemekaran kecamatan dibentuk berdasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan mendukung terselenggaranya otonomi daerah.

Adapun pembentukan nama, batas, dan ibukota kecamatan yang dimekarkan diatur dengan peraturan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pemekaran kecamatan itu sendiri, lebih lanjut dikemukakan juga oleh Wasistiono (1992:15), bahwa: "Pemekaran kecamatan adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan yang dimekarkan mendapatkan kewenangan dari bupati/walikota dan lebih bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan, dan bidang pembangunan". Pemekaran kecamatan berarti terbentuknya kecamatan baru, kecamatan baru tersebut merupakan salah satu dari organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008, pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:
 - a) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 - b) Batas usia penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;

- c) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - d) Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 - e) Rekomendasi Gubernur.
2. Syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
 - a) Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
 - b) Lokasi calon memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 - c) Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
 - a) jumlah penduduk;
 - b) luas wilayah;
 - c) rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - d) aktivitas perekonomian;
 - e) ketersediaan sarana dan prasarana.

Persyaratan teknis dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

Pedoman pembentukan kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 memiliki kriteria di Tabel 4.



Tabel 4. Kriteria Pembentukan Kecamatan

Indikator	Kriteria
1. Jumlah Penduduk	
Wilayah Jawa dan Bali	Minimal 10.000 Jiwa
Wilayah Sumatra dan Sulawesi	Minimal 7.500 jiwa
Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua	Minimal 5.000 ,jiwa
2. Luas Wilayah	
Wilayah Jawa & Bali	Minimal 7,5 km
Wilayah Sumatera & Sulawesi	Minimal 10 km
Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua	Minimal 10 km
3. Jumlah Desa/Kelurahan	Seragam untuk semua yaitu 4 desa/Kelurahan

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000

Ada beberapa kecamatan yang dimekarkan walaupun tidak memenuhi semua persyaratan seperti dalam tabel diatas tetapi karena jumlah penduduknya terlalu banyak kemudian kecamatan tersebut dimekarkan. Menurut BPS jumlah ideal kepadatan penduduk rata-rata nasional per km² adalah 250 jiwa/km², sedangkan menurut WHO kepadatan penduduk ideal di suatu wilayah adalah 240 jiwa/km². Jadi jika kepadatan penduduk dalam suatu wilayah terlalu padat maka dapat dilakukan pemekaran.

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*)

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*a process of enlarging people's choices*"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat digunakan dalam melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP, 1990). Pada dasarnya IPM mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:

1. Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup
2. Berpengetahuan dan berketarampilan,
3. Akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Lebih jelasnya UNDP menentukan beberapa komponen besaran IPM, yaitu usia hidup (*longevity*) diukur dari angka harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan

standar hidup layak (*decent living*) diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Teknis menentukan IPM dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- a. Indeks kesehatan, dengan menggunakan indikator angka harapan hidup.
- b. Indeks pendidikan , dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
- c. Indeks daya beli, dengan indikator standar hidup layak.

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} \times (IK + IP + IDB)$$

dimana :

IK : Indeks kesehatan

IP : Indeks pendidikan

IDB: Indeks standar hidup layak (*indeks daya beli*)

Indeks Kesehatan

Dalam perhitungan indeks kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks kesehatan (IK) diadopsi dari UNDP adalah:

$$IK = \frac{X_t - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

dimana:

IK = Indeks Kesehatan

X_t = Angka Harapan Hidup pada tahun tertentu

X_{min} = Angka Harapan Hidup minimum = 25

X_{max} = Angka Harapan Hidup maksimum = 85



Indeks Pendidikan

Selain memasukkan indeks kesehatan, perhitungan IPM juga memasukkan indeks pendidikan. Indeks pendidikan berbeda dengan indeks kesehatan, karena di dalam indeks pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yaitu: indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya adalah 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah mempunyai batas maksimum 15 dan mempunyai batas minimum 0. Rumusan yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan (IP) berdasarkan BPS dan UNDP adalah:

Rumus Untuk Menghitung Indeks Melek Huruf

$$IMH = \frac{X_t - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Dimana:

- IMH = Indeks Melek Huruf
- X_t = Angka Melek Huruf pada tahun tertentu
- X_{min} = Angka Melek Huruf minimum = 0
- X_{max} = Angka Melek Huruf maksimum = 100

Rumus Untuk Menghitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

$$IRLS = \frac{X_t - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Dimana:

- IRLS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah
- X_t = Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun tertentu
- X_{min} = Angka Rata-rata Lama Sekolah minimum = 0
- X_{max} = Angka Rata-rata Lama Sekolah maksimum = 15

Rumus Untuk Menghitung Indeks Pendidikan

$$IP = \frac{2}{3} (IMH) + \frac{1}{3} (ILS)$$

Dimana:

- IP = Indeks Pendidikan
- IMH = Indeks Melek Huruf
- ILS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah
- 2/3 = Bobot IMH yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP
- 1/3 = Bobot ILS yang ditetapkan secara arbitrer oleh UNDP

Indeks Daya Beli

Selain mengandalkan pada peningkatan indeks kesehatan dan indeks pendidikan, perubahan IPM juga tergantung pada perubahan indeks daya beli (*purchasing power index*). Indeks daya beli mengakomodir besarnya perubahan dalam pengeluaran per kapita riil per tahun atau pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan mengakomodir besarnya pengeluaran per kapita riil di masing-masing wilayah berdasarkan patokan perubahan harga kota besar tertentu.

Untuk menghitung indeks daya beli digunakan rumus dari BPS dan UNDP adalah sebagai berikut:

$$IDB = \frac{X_t - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Dimana:

- IDB = Indeks Daya Beli
- X_t = Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan pada tahun tertentu
- X_{min} = Pengeluaran Per Kapita Minimal = Rp 360.000
- X_{max} = Pengeluaran Per Kapita Maksimum = Rp 732.720

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

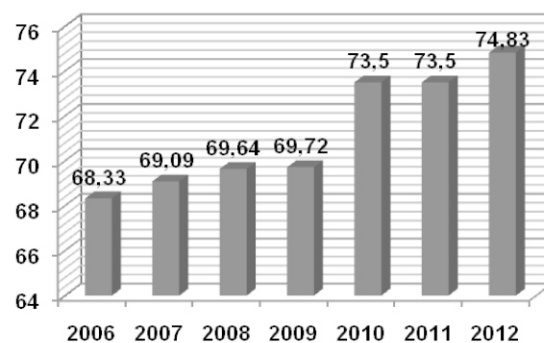
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, observasi lokasi penelitian, dan wawancara. Peneliti mencari data tentang IPM Kecamatan Tegalsari kemudian dari data tersebut peneliti meminta tanggapan kepada Camat sebagai *Key Informan*, Lurah serta masyarakat di Kecamatan Tegalsari.



Tabel 5. Indeks Kesehatan Kecamatan Tegalsari Tahun 2005-2012

Tahun	AHH	Indeks Kesehatan
2005	-	-
2006	65,99	68,33
2007	66,45	69,09
2008	66,78	69,64
2009	66,83	69,72
2010	69,10	73,50
2011	69,10	73,50
2012	70,54	74,83

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1
Grafik Perkembangan Indeks Kesehatan Kecamatan Tegalsari

Sumber: diolah peneliti

Kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Indeks Kesehatan

Terjadi peningkatan indeks kesehatan Kecamatan Tegalsari setiap tahunnya pasca pemekaran, dari awal perhitungan indeks kesehatan Kecamatan Tegalsari pada tahun 2006 sebesar 68,33 menjadi 74,83 pada tahun 2012 seperti yang terlihat dalam Tabel 5 dan Gambar 1.

Dengan adanya pemekaran kecamatan menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya indeks kesehatan di Kecamatan Tegalsari, dengan adanya pemekaran kecamatan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas, posyandu dan juga peningkatan jumlah tenaga kesehatan sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan angka harapan hidup yang berimbas langsung pada indeks kesehatan.

Peningkatan indeks kesehatan Kecamatan Tegalsari tidak semata-mata karena faktor adanya pemekaran kecamatan, masih ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan indeks kesehatan antara lain faktor kesadaran dari masyarakat Tegalsari itu sendiri akan pentingnya kesehatan dan juga ada program-program lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi seperti program jamkesda dan jampersal dan biaya kesehatan gratis sejak tahun 2005 melalui kebijakan berupa Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

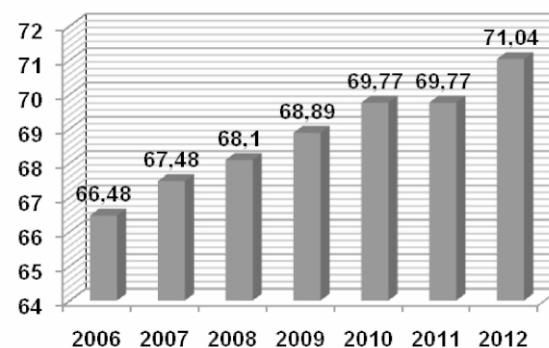
2. Indeks Pendidikan

Adanya peningkatan indeks pendidikan Kecamatan Tegalsari setiap tahunnya pasca pemekaran walaupun peningkatannya lambat, tetapi jika melihat data perkembangan indeks pendidikan Kecamatan Tegalsari mulai awal perhitungan yaitu tahun 2006 sampai tahun terakhir yaitu tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari angka 66,48 pada tahun 2006 menjadi 71,04 pada tahun 2012

Tabel 6. Indeks Pendidikan Kecamatan Tegalsari Tahun 2005-2012

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf	Indeks Pendidikan
2005	-	-	-
2006	5,08	82,78	66,48
2007	5,14	84,09	67,48
2008	5,19	84,86	68,1
2009	5,22	85,93	68,89
2010	5,25	87,14	69,77
2011	5,25	87,14	69,77
2012	5,39	88,58	71,04

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi



Gambar 2
Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kecamatan Tegalsari

Sumber: diolah peneliti



seperti yang terlihat dalam Tabel 6 dan Gambar 2.

Indeks pendidikan Kecamatan Tegalsari naik setelah pemekaran, hal ini seiring perkembangan sekolah dan guru di Kecamatan Tegalsari yang juga semakin meningkat. Pemekaran menjadi salah satu pemicu peningkatan tersebut, sejak adanya pemekaran kecamatan sarana pendidikan terutama sekolah dan tenaga pendidik semakin bertambah, sehingga masyarakat Tegalsari merasa lebih mudah mendapatkan pendidikan sehingga mendorong mereka untuk semangat memperoleh pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen utama untuk mengukur indeks pendidikan.

Peningkatan ini bukan hanya semata-mata karena adanya pemekaran kecamatan, peningkatan indeks pendidikan Kecamatan Tegalsari juga dipengaruhi oleh faktor lain juga. Kabupaten Banyuwangi mempunyai kebijakan yang cukup bagus dalam pendidikan diantaranya adalah kebijakan sekolah gratis untuk sekolah yang berlabel negeri. Sejak Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Bupati Tri Ratna Sari yaitu tepatnya sejak tahun 2005 melalui kebijakan berupa Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan kepada orang tua/wali murid SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri, sejak itulah di Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah negeri, kemudian kebijakan tersebut diteruskan oleh bupati penerusnya. Kebijakan ini juga mendukung peningkatan indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi termasuk Kecamatan Tegalsari.

Tabel 7. Indeks Daya Beli Kecamatan Tegalsari Tahun 2005-2012

Tahun	Indeks Daya Beli
2005	-
2006	59,94
2007	60,16
2008	61,27
2009	63,54
2010	64,19
2011	64,69
2012	65,04

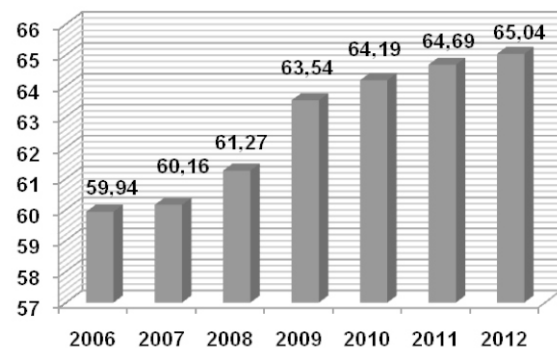
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

3. Indeks Daya Beli

adanya peningkatan indeks daya beli masyarakat Kecamatan Tegalsari setiap tahunnya pasca pemekaran, terlihat peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari angka 59,94 pada tahun 2006 menjadi 65,04 pada tahun 2012 seperti yang terlihat dalam Tabel 7 dan Gambar 3.

Dengan adanya pemekaran kecamatan mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan pengaspalan jalan, pasar, dan berbagai infrastruktur telah memacu kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Peningkatan daya beli masyarakat juga bukan semata-mata karena pemekaran, pemekaran hanya sebagai salah satu pemicu karena dalam perekonomian banyak sekali faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat daya beli masyarakat. Di Kecamatan Tegalsari faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan perekonomian antara lain adanya beberapa program perekonomian yang cukup berhasil diantaranya program PNMP mandiri, dari program PNPM Mandiri tiap tahunnya Kecamatan Tegalsari mendapat bantuan alokasi dana. Pada tahun 2009 Kecamatan Tegalsari mendapat alokasi dana Rp. 1.250.000.000 begitupun pada tahun 2010 dan 2011 juga sebesar Rp. 1.250.000.000 sedangkan tahun 2012 mendapat alokasi dana Rp. 700.000.000 dan tahun 2013 sebesar 800.000.000 Adanya program kredit usaha rakyat (KUR) yang membuat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan modal untuk berusaha juga mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat Tegalsari.



Gambar 3
Grafik Perkembangan Indeks Daya Beli Kecamatan Tegalsari

Sumber: diolah peneliti



Tabel 8. IPM Kecamatan Tegalsari Tahun 2005-2012

Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks Pendidikan	Indeks Daya Beli	IPM
2005	-	-	-	-
2006	68,33	66,48	59,94	64,92
2007	69,09	67,48	60,16	65,58
2008	69,64	68,1	61,27	66,37
2009	69,72	68,89	63,54	67,38
2010	73,50	69,77	64,19	69,15
2011	73,50	69,77	64,69	69,32
2012	75,90	71,04	65,04	70,66

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

4. IPM

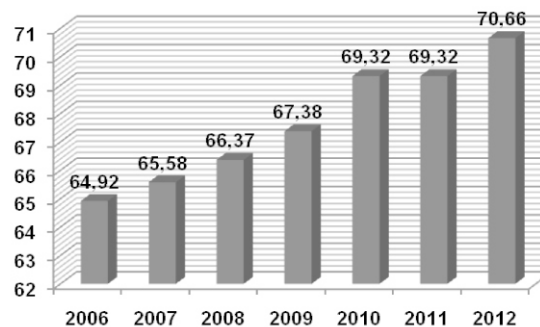
Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan dengan adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya dari angka 64,92 pada tahun 2006 hingga menjadi 70,66 pada tahun 2012 seperti yang terlihat dalam Tabel 8 dan Gambar 4.

Dengan adanya pemekaran berdampak positif bagi Kecamatan Tegalsari. Pembangunan di Kecamatan Tegalsari semakin meningkat pasca pemekaran, adanya perkembangan berbagai infrastruktur seperti sekolah didikuti bertambahnya tenaga pengajar, puskesmas diikuti perkembangan tenaga medis, pasar, dan pembangunan pengaspalan jalan, pembangunan kantor kecamatan. Dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut pada akhirnya memicu peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari. Pemekaran hanya sebagai pemicu, peningkatan IPM tersebut tidak semata-mata karena pemekaran, banyak faktor-faktor

Tabel 9. Perbandingan IPM Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Gambiran dan Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Kec. Tegalsari (Kec. Pemekaran)	Kec. Gambiran (Kec. Induk)	Kabupaten Banyuwangi
2003	-	63,98	64,56
2004	-	64,23	65,30
2005	-	65,87	66,00
2006	64,92	67,10	66,80
2007	65,58	67,95	67,24
2008	66,37	68,54	67,80
2009	67,38	69,03	68,36
2010	69,15	69,91	68,89
2011	69,32	69,91	69,58
2012	70,66	73,56	69,82

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi



Gambar 4 Grafik Perkembangan IPM Kecamatan Tegalsari

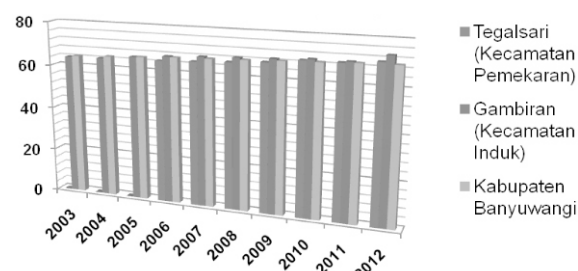
Sumber: diolah peneliti

lain yang juga menyebabkan IPM meningkat tergantung kebijakan dari masing-masing bidang yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan dan juga bidang perekonomian.

5. Perbandingan IPM kecamatan Tegalsari dengan Kecamatan induk dan IPM Kabupaten Banyuwangi

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan IPM Kecamatan Tegalsari maka peneliti mengambil perbandingan dengan IPM kecamatan induk yaitu Kecamatan Gambiran dan IPM Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan.

Dari data diatas terlihat perbandingan IPM antara Kecamatan Tegalsari sebagai kecamatan pemekaran dengan Kecamatan Gambiran sebagai kecamatan induk dan Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Terlihat bahwa IPM Kecamatan Tegalsari selalu dibawah IPM Kecamatan Gambiran setiap tahunnya. Dan IPM Kecamatan Tegalsari untuk tahun 2011 kebawah selalu dibawah IPM Kabupaten Banyuwangi, tetapi untuk tahun 2012 IPM Kecamatan Tegalsari mampu diatas IPM kabupaten Banyuwangi, yaitu 70,66 sedangkan IPM Kabupaten Banyuwangi 69,82.



Gambar 5 Perbandingan IPM Kecamatan Tegalsari, Gambiran, dan Kabupaten Banyuwangi

Sumber: diolah peneliti



Namun ada peningkatan IPM setelah pemekaran dibandingkan ketika belum pemekaran. Yaitu dari angka 63,98 pada tahun 2003 dan 64,23 pada tahun 2004 ketika masih bergabung dengan Kecamatan Gambiran menjadi 64,92 pada tahun 2006 setelah pemekaran menjadi Kecamatan Tegalsari. Ketika hasil perbandingan data IPM tersebut peneliti sampaikan ke Camat Kecamatan Tegalsari, Bapak Drs. Abin Hidayat, MM. berikut tanggapan Beliau:

".....untuk pembangunan itu wajar kalau kecamatan induk maju duluan, tapi disini ini lambat bukan karena, ya lambat kalau njenengan mengambil nilai rata-rata, tapi kalau dilihat dari infrastuktur disini justru condong lebih maju. Memang kondisi riil masyarakatnya begitu, kalau tidak dipacu dengan infrastruktur maka tidak bisa masyarakat itu diberdayakan tanpa adanya infrastuktur, terus yang kedua notabene Bupati kan asalnya dari sini, Karangdoro, sedikit banyak mungkin psikologis lah, contohnya gini, masak Bupati mau pulang ke desanya jalannya rusak". (Kamis, 12 Desember 2013)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Bapak Camat wajar jika Kecamatan Gambiran sebagai kecamatan induk maju duluan, tetapi kalau dilihat dari segi infrastruktur justru menurut Beliau Kecamatan Tegalsari lebih maju, hal ini disebabkan karena kondisi masyarakatnya yang tidak bisa diberdayakan tanpa adanya infrastruktur dan juga karena Bupati Banyuwangi saat ini yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas berasal dari Kecamatan Tegalsari tepatnya dari Desa Karangdoro.

6. Hambatan dan Tantangan

Untuk menjawab apa hambatan dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM peneliti meminta tanggapan dari Camat Kecamatan Tegalsari Bapak Abin Hidayat selaku pemangku jabatan tertinggi. Kepala Desa dan masyarakat di Pemerintah Kecamatan Tegalsari. Yang dimaksud hambatan disini adalah halangan atau rintangan yang dihadapi saat ini untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari, sedangkan yang dimaksud tantangan disini adalah hal atau objek yang kedepannya bisa berpengaruh dalam meningkatkan IPM kecamatan Tegalsari.

Berikut beberapa hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari yang merupakan pendapat dari Camat, kepala

desa dan masyarakat Kecamatan Tegalsari dalam sebuah wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

1. Potensi wilayah yang kurang heterogen, dimana masyarakat Tegalsari adalah masyarakat lokal, yang pekerjaannya sebagian besar adalah petani seperti pernyataan informan berikut ini:
Bapak Abin Hidayat Camat Kecamatan Tegalsari:

"..... ya potensi, disini masyarakat lokal, notabene pekerjaannya petani, masyarakat petani dengan masyarakat pebisnis dan pedagang kan beda tingkat pembangunannya. Dari segi peningkatannya memang agak lambat, satu karena masyarakatnya tidak heterogen, disini masyarakatnya rata-rata petani, sifat perantauannya itu kecenderungan hanya perantauan ke luar negeri". (Kamis, 12 Desember 2013).

Bapak Drs. Sucipto Poernomo, selaku Kepala Desa Tamansari:

".....memang dengan potensi masyarakat disini yang sebagian besar petani, menurut saya agar pembangunan maju pesat di Kecamatan Tegalsari ini perlu adanya program-program inovasi di bidang pertanian misalnya, adanya produk unggulan pertanian seperti yang ada di Blitar ada produk unggulan Blimbing yang sampai masuk ke Supermarket..." (Selasa, 10 Desember 2013)

2. Kurangnya pelopor pembangunan di Kecamatan Tegalsari, walaupun potensi pertaniannya bagus tetapi belum ada orang yang bisa menjadi pelopor seperti pernyataan yang disampaikan Bapak Lahuri, Kepala Desa Karangmulya dan masyarakat sebagai berikut:

Bapak Lahuri, selaku Kepala Desa Karangmulya:

".....potensi pertanian disini ok, yang jelas kalau dari Tegalsari *mindset* pola pikirnya untuk dikembangkan itu tidak ada, harus ada kesinambungan antara pertanian dan orang yang bisa menjadi pelopor. Merubah pola pikir dari pertanian ke industri tidak gampang teori, tetapi harus bisa ada pelopor pembangunan, pelopor pembangunan ini yang di Tegalsari saya rasa belum terlalu ada, jadi sifatnya datar-datar saja". (Senin, 9 Desember 2013).

Bapak Hidayat, selaku warga Desa



Karangmulya:

".....begini ya mas, memang saya akui kalau tanah pertanian di desa sini itu subur atau loh. Tapi menurut saya kurang bisa dimanfaatkan dengan baik, artinya sebenarnya bisa dibuat produktif lagi, tanaman lebih bervariasi lagi.....dan perlu seseorang atau kelompok yang memulai duluan...." (Senin, 9 Desember 2012)

3. Budaya masyarakat Tegalsari yang masih tradisional atau ketinggalan zaman. Seperti halnya pernyataan dari Camat sebagai berikut:

".....kalau di Tegalsari itu yang mempengaruhi pemicu kesejahteraan suatu wilayah antaralain SDMnya, kultur masyarakatnya, lingkungan sekitar kewilayahan, infrastruktur, dan potensi wilayah. Masyarakat disini itu masyarakat utun, kultur masyarakatnya tradisional". (Kamis, 9 Desember 2013).

Sedangkan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari sebagai berikut:

1. Adanya kucuran dana yang cukup untuk Kecamatan Tegalsari, dengan adanya dana yang banyak tersebut menjadi tantangan agar dana tersebut mampu dimaksimalkan untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Tegalsari utamanya pembangunan infrastruktur, SDM dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan berikut ini:

".....Banyuwangi khususnya Tegalsari ini kucuran dana cukup banyak, ada sekitar 14 miliar, lebih dari cukup, porsinya lebih tinggi dari kecamatan lain, tapi jelas 14 miliar bukan hanya untuk infrastruktur saja, untuk porsi pembangunan sekitar 3-4 miliar". (Kamis, 12 Desember 2013).

2. Adanya wacana kedepan tentang rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi yaitu pembentukan Kabupaten Banyuwangi Selatan yang berencana beribukota di Genteng yang secara langsung berbatasan dengan kecamatan Tegalsari, rencananya akan dibuat jalan lingkar dan terminal yang letaknya masuk dalam wilayah Tegalsari. Itu merupakan tantangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Tegalsari untuk meningkatkan perekonomiannya seperti membuat tempat usaha, toko atau usaha lain.

Hal itu seperti penjelasan Bapak Abin Hidayat dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

".....rencana kedepan kan ada pemekaran kabupaten, ibukotanya di Genteng, ini nanti akan dibuat jalan tembus dan terminal yang letaknya di Desa Dasri, ini nanti Tegalsari apakah ada korelasi antara itu dengan pembangunan ekonomi secara global masyarakat Tegalsari!. (Kamis, 12 Desember 2013).

3. Adanya program dari Bapak camat untuk memberdayakan masyarakat. Beliau menginginkan tiap desa mempunyai produk unggulan yang merupakan khas kewilayahan dari masing-masing desa di Kecamatan Tegalsari. Program ini ternyata mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan informan berikut ini:

Bapak Abin Hidayat Camat Kecamatan Tegalsari:

"..... Saya Mas disini mempunyai program dalam program pemberdayaan masyarakat, saya ingin setiap desa memiliki ciri khas produk unggulan yang khas kewilayahan, kayak Tegalsari ini krupuk kromoleo, waluh Tegalrejo, Tamansari gethuk godhong, sale goreng Karangmulyo, dan Karangdoro rencana menciptakan bordir". (Kamis, 12 Desember 2013).

Bapak Samani Assidiq, selaku Kepala Desa Tegalsari:

".....saya sangat setuju dan akan terus memberikan dukungan kepada warga di desa saya untuk terus mengembangkan dan menggali produk-produk yang khas di Desa Tegalsari ini, melalui keikutsertaan warga dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan di Kabupaten atau ke luar kota..." (Senin, 09 Desember 2013)

Bapak Andik, pemilik home industri salr goreng di Desa Karangmulyo sebagai berikut: ".....saya sebagai warga sangat senang sekali dengan adanya program Bapak Camat yang memiliki program untuk peningkatan hasil pertanian/ladang dengan cara mengolahnya menjadi makanan khas seperti sale seperti. Dulu banyak pisang tapi tidak punya keinginan untuk mengolahnya. Sekarang lumayan untuk tambahan penghasilan he....he...." (Selasa, 10 Desember 2013)



E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pemekaran Kecamatan Tegalsari berdampak positif pada perkembangan IPM Kecamatan Tegalsari karena terlihat adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari per-tahunnya pasca pemekaran yaitu 64,92 pada tahun 2006, hingga mencapai 70,66 pada tahun 2012. Dan ada peningkatan IPM setelah dilakukan pemekaran dibandingkan ketika belum dilakukan pemekaran. Yaitu dari angka 63,98 pada tahun 2003 dan 64,23 pada tahun 2004 ketika masih bergabung dengan Kecamatan Gambiran menjadi 64,92 pada tahun 2006 setelah pemekaran menjadi Kecamatan Tegalsari
- b. Hambatan saat ini yang dialami pemerintah kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, dimana masyarakat Tegalsari adalah masyarakat lokal yang pekerjaannya sebagian besar adalah petani, kurangnya pelopor pembangunan di Kecamatan Tegalsari, dan budaya masyarakat Tegalsari yang masih tradisional.
- c. Tantangan ke depan yang dialami pemerintah Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM kecamatan Tegalsari adalah adanya kucuran dana yang cukup banyak untuk Kecamatan Tegalsari, adanya wacana kedepan tentang rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi yaitu pembentukan Kabupaten Banyuwangi Selatan yang berencana beribukota di Genteng yang secara langsung berbatasan dengan kecamatan Tegalsari, dan adanya program dari Bapak Camat untuk memberdayakan masyarakat. Beliau menginginkan tiap desa mempunyai produk unggulan yang merupakan khas kewilayahan dari masing-masing desa di Kecamatan Tegalsari

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan IPM Kecamatan Tegalsari juga harus ditunjang dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mendukung peningkatan IPM seperti sekolah murah atau gratis, biaya kesehatan murah, dan pemerataan

pembangunan.

- b. Pemerintah Kecamatan Tegalsari harus lebih aktif menjadi pelopor atau menjadi penggerak pembangunan di Kecamatan Tegalsari melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan manusia Kecamatan Tegalsari contohnya memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai bakat, minat dan kemampuan untuk membentuk kelompok usaha.
- c. Kebijakan pemekaran kecamatan seperti pemekaran Kecamatan Tegalsari dapat diterapkan didaerah lain jika memang daerah tersebut memang sudah siap dan layak dimekarkan, karena kebijakan pemekaran kecamatan dapat berdampak positif bagi wilayah dan masyarakat pemekaran, tetapi disisi lain perlu juga diketahui bahwa pemekaran kecamatan juga akan berdampak negatif pada anggaran yaitu terjadi pembekakan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, Ami. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat* (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Arikunto, Suharsimi. 1994. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS, 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011*. Badan Pusat Statistik Jakarta
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003, *Reformasi Tata pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Dye, R. Thomas, 1987, *Understanding Public Policy*, prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey
- Islamy, Irfan M, 2001, *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Koentjoroningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Muluk, M.R Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ratnawati, Tri, 2009. *Pemekaran Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly



- Hills London: Sage Publications.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Supriyady, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pusta Utama 2003
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin.
- Osborne, David, dan Ted Gaebler. 1995. *Mewirusahaakan Birokrasi*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- UNDP, 1990. *Human Development Index*.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan*, Bandung: Citrapindo
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PTRadja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada
- www.banyuwangikab.go.id diakses tanggal 15 Mei 2013
- www.kemendagri.go.id diakses tanggal 15 Mei 2013

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)